

EVALUASI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELEMBAGAAN ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN GENDER (SAGA) DALAM LITKAJI LINGKUP LITBANG PERTANIAN¹

RITA NUR SUHAETI DAN EDI BASUNO

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian,
Badan Litbang Pertanian, Bogor**

ABSTRACT

Evaluation on SAGA activity in Research and Assessment within the IAARD. Relatively low technology adoption level by end users had triggered application of participatory approach, user oriented technology and more pay attention to user's social aspects. Socio-economic And Gender Analysis (SAGA) Core Team (SCT) establishment was the initiation of Socialization and Institutionalization program within the Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD). The main objective of the program is to establish SAGA capacity of the researchers and extension workers within the IAARD. The data were gained from eight Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) by applying structured and semi-structured interviews and Focused Group Discussion (FGD). Respondents for the study were alumnae of the SAGA training workshop. The cascade training workshops were held within the period of 2000 - 2002, beginning from Training of Master Trainers (TOM), Training of Trainers (TOT) and Training of Staff (TOS). Number of the TOM, TOT and TOS were 18; 124; and 416 persons respectively. From the quantity aspect, the number seemed to be promising but not from the quality aspect. The cascade training has not given yet expected result. Each alumna was expected to be SAGA focal points and could establish networking within the region. The main cause was that not all alumnae could disseminate the SAGA approach in each working unit. Less optimal output of the TOM alumnae caused a bumpy regional networking establishment. This reflected that TOM's alumnae dependency level to the SCT was quite high. It also affected outputs of TOT and TOS. In addition, less understanding on SAGA materials of the respective facilitators in each workshop ended in less understanding of the workshop participants. Various reported results of monitoring and evaluation (Monev) activities showed that the institutionalization of SAGA approach was less optimal and it was reflected by low Monev grade of each observed AIATs.

Keywords: Gender, Social Economics, Socialization, Institutionalization, Research and Development (R&D), Research and Assessment (R&A)

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 1999, Bank Dunia mendeteksi bahwa tingkat adopsi teknologi hasil-hasil penelitian dan pengkajian (Litkaji) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian (selanjutnya disebut Badan Litbang) relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan perencanaan dan pelaksanaan pengkajian yang kurang memperhatikan kebutuhan pengguna dan aspek sosial masyarakat pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti dan penyuluh lingkup Badan Litbang Pertanian terutama di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Program ini diawali dengan membentuk Tim Inti *Social economic*

¹ Makalah ini telah dibahas pada seminar rutin Kelti Kelembagaan dan Organisasi Pertanian

and Gender Analysis (SAGA) yang beranggotakan para peneliti lintas Puslitbang dalam Badan Litbang Pertanian. Selanjutnya Tim Inti SAGA didampingi seorang konsultan *gender specialist* Bank Dunia (Ms. Christine Pomerleau-Pelzer) berkeliling ke beberapa BPTP untuk mengevaluasi kapasitas SAGA para peneliti dan penyuluhnya. Dari hasil kunjungan tersebut, kemudian disusun sebuah program untuk melaksanakan sosialisasi dan pelebagaan analisis sosial ekonomi dan gender lingkup Badan Litbang. Karena diduga program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan para pengambil kebijakan lingkup Badan Litbang, maka kegiatan awal adalah melakukan *public awareness* berupa *Seminar for Decision Makers* kepada para pengambil kebijakan Lingkup Badan Litbang. Kegiatan lainnya adalah melaksanakan pelatihan dengan cara berjenjang (*cascade training*) dimulai dengan membentuk pelatih ahli (*Master Trainers*) pada *Training of Master Trainers* dilanjutkan dengan membentuk pelatih (*trainers*) pada *Training of Trainers* (TOT) serta pelatihan selanjutnya diselenggarakan di BPTP yakni *Training of Staff* (TOS). Penyelenggaraan TOM dilaksanakan di Yogya pada Maret 2000 serta TOT di enam lokasi pada tahun 2001-2002. Gambar 1. menyajikan sistem pelatihan berjenjang berupa piramida terbalik dan tujuannya. Walaupun belum semua BPTP melaksanakan TOS, tetapi lebih dari setengah jumlah BPTP telah melaksanakannya, bahkan ada yang sudah dua kali melaksanakan. Sampai pada tahap ini kegiatan sosialisasi dilakukan. Sebagai langkah pelebagaannya, saat mengajukan proposal, kriteria penerapan analisis sosial ekonomi dan gender dalam proposal yang diajukan oleh BPTP dievaluasi. Terdapat tiga aspek yang dinilai yakni analisis sosial ekonomi, pendekatan partisipatif dan analisis gender maka jika tidak ada satu pun dari tiga aspek yang dinilai terdapat dalam proposal maka nilainya antara 0 dan 1, jika sudah terdapat satu aspek dalam proposal maka nilainya antara 2 dan 3 dan jika ketiga aspek sudah masuk maka nilainya lebih dari 3. Kegiatan lainnya adalah membentuk jejaring kerja dengan mitra kerja baik di dalam lingkup maupun luar lingkup Badan Litbang dan penerbitan Buletin sebagai media komunikasi antara TIS, *focal points* dan mitra kerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pelebagaan analisis sosial ekonomi dan gender lingkup Badan Litbang antara tahun 2000 sampai dengan 2002. Karena diasumsikan kapasitas analisis sosial ekonomi para peneliti dan penyuluh Badan Litbang relatif sudah lebih baik, maka penekanan diarahkan pada aspek analisis gender.

METODOLOGI

Data dalam tulisan diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner terstruktur untuk sebagian purna-widya (alumni) TOM, TOT dan TOS di delapan BPTP Provinsi yakni

(1) BPTP Nusa Tenggara Timur NTT, (2) BPTP Nusa Tenggara Barat (NTB), (3) BPTP Sulawesi Utara (Sulut), (4) BPTP Sulawesi Tengah (Sulteng), (5) BPTP Sulawesi Selatan (Sulsel), (6) BPTP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), (7) BPTP Riau dan (8) BPTP Jambi. Metode lain seperti wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan *check list* dan *focused group discussion* (FGD) juga dilakukan terutama untuk mengumpulkan data kualitatif.

Kuesioner terstruktur digunakan untuk alumni lokakarya (TOM, TOT dan atau TOS) baik penyuluh, peneliti maupun non-peneliti/penyuluh. Sedangkan kuesioner semi-terstruktur atau biasa disebut pedoman wawancara dan FGD digunakan untuk mengumpulkan data dari kepala unit kerja dan para pengambil kebijakan tingkat BPTP. Data lain diperoleh dari laporan kegiatan Tim Inti SAGA selama periode 2000 – 2002.

Untuk mengetahui nilai pelaksanaan sosialisasi dan pelebagaan SAGA dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk kegiatan ini. Dengan mengisi lembar kerja Monev, seperti disajikan pada Lampiran 1. Lembar kerja ini dibuat dua macam yang pertama untuk BPTP yang sudah melakukan TOS dan yang lainnya untuk BPTP yang belum melakukan TOS. Untuk mengetahui pelebagaan SAGA, dilihat juga seberapa banyak kapasitas SAGA diinkorporasikan ke dalam Litkaji.

PENGERTIAN GENDER DAN PENGGUNAANNYA

Gender yang dalam bahasa aslinya (bahasa Inggris) ditulis gender, tidak mempunyai padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Dahulu istilah gender hanya dikenal dan digunakan dalam kaitannya dengan studi bahasa. Di dalam kamus, pengertian antara kata sex dan gender tidak dibedakan secara jelas. Ketika gender dibicarakan sebagai konsep, maka muncul berbagai kerancuan, karena selama ini belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting dalam memahami ketidakadilan sosial. Padahal pengertian gender harus dipahami karena konsep ini diperlukan untuk dapat membahas permasalahan perempuan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat satu ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain dikenal dengan konsep gender. Dengan kata lain, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada tatanan dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan yang ditetapkan bukan berdasarkan biologis tetapi konteks sosial, ekonomi dan politik (berdasarkan konstruksi sosial). Konsep gender sebagai suatu konstruksi sosial telah mengalokasikan peranan, hak, kewajiban serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam fungsi produksi maupun reproduksi.

Pengalaman di lapang selama ini menunjukkan adanya perbedaan yang dapat diamati antara konsep gender dalam pembahasan para ahli berikut aplikasinya dengan konsep gender dalam kebijakan, program dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai konstruksi sosial yang umumnya sudah disosialisasikan sejak dini, gender ternyata menyumbangkan ketidakadilan (*inequalities*) dan manifestasi ketidakadilan dapat terjadi pada proses penentuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pelaksanaan maupun evaluasi proyek pembangunan di lapangan.

Uraian tersebut di atas mengantarkan kita pada pemahaman bahwa gender sebagai suatu konsep yang tepat untuk dipergunakan dalam membahas permasalahan atau isu pembangunan. Kepedulian terhadap masalah gender akan menyebabkan kita berupaya menghilangkan atau mengurangi terjadinya ketimpangan gender, karena hal ini dapat merugikan perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian diharapkan kalau tidak ada ketimpangan gender, seluruh potensi SDM dapat dioptimalkan dan manfaat pembangunan secara merata dapat dinikmati oleh semua pihak.

Seringkali dipermasalahkan apakah benar dalam mempersoalkan ketimpangan gender lebih banyak mempermasalahkan kerugian perempuan dan keuntungan laki-laki. Sebenarnya ketimpangan gender yang merugikan perempuan, secara tidak langsung merupakan kerugian bagi masyarakat keseluruhan. Ketertinggalan perempuan mengakibatkan mereka tidak dapat berperan dan menjadi mitra sejajar laki-laki, akibatnya hubungan kedua pihak menjadi timpang.

Menurut pengamatan di masyarakat, sampai saat ini perempuanlah - karena jenis kelamin mereka - yang lebih banyak mengalami ketidakadilan gender. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan norma-norma masyarakat membatasi ruang gerak mereka dan memberi mereka peran dan tugas yang dianggap kurang penting dibanding jenis kelamin lainnya (laki-laki). Disamping itu, ketimpangan gender terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Misalnya, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keluarga, sosial/kemasyarakatan, hukum, adat dsb. (KPDTNT, 1996).

Jadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki bukan satu-satunya ketimpangan yang perlu diperjuangkan demi keadilan, karena semua ketimpangan perlu diperjuangkan. Semua orang, laki-laki dan perempuan adalah manusia yang perlu ditingkatkan harkat dan derajatnya.

Dari uraian di atas jelas bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang telah berlangsung lama, sehingga seringkali dirancukan dengan kodrat. Adapun arti kodrat adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, sehingga manusia tidak bisa mengubah atau menolaknya. Kodrat adalah sesuatu yang sifatnya *universal* (tidak berubah, pada setiap

waktu, pada setiap tempat). Gender adalah pembagian peran laki-laki dan perempuan yang diatur oleh manusia (masyarakat). Gender berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, bahkan di dalam suatu masyarakat juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, gender *bukan kodrat*.

PENELITIAN PERTANIAN BERDIMENSI GENDER

Banyak penelitian tentang peran perempuan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik di Departemen Pertanian (dalam hal ini Badan Litbang) maupun di luar Deptan. Topik penelitiannya bervariasi meliputi alokasi waktu dan tenaga perempuan tani dalam kegiatan pertanian, *income generating activities*, tingkat pengambilan keputusan, pemasaran hasil dsb. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan dan laporannya dipublikasikan tetapi manfaat penelitian tersebut belum secara adil dinikmati oleh perempuan dan bahkan cenderung merugikan. Di sisi lain, perempuan yang bekerja sebagai petani tidak dianggap berprofesi sebagai petani, tetapi hanya sebagai anggota keluarga (isteri petani). Akibatnya, akses perempuan untuk mendapatkan penyuluhan teknologi, kredit usaha tani ataupun peningkatan kemampuan dan keterampilan pertanian lainnya relatif masih rendah (Muffels and Siwi, 1990).

Meskipun di pedesaan laki-laki dan perempuan bekerja bersama-sama di usaha taninya, namun kesenjangan, terutama dalam menggali potensi dan kemampuan perempuan masih tetap ada. Akibatnya, mereka selalu tertinggal dari laki-laki karena mungkin dalam perencanaan pembangunan di masa-masa yang lalu secara tidak sengaja telah melupakan peran perempuan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka isu gender di sektor pertanian meliputi antara lain seperti dikemukakan Siwi dkk. (2000): (1) Mengakui peranan yang dilakukan perempuan tani dengan segala aspeknya, (2) Memiliki pengertian yang lebih baik tentang berbagai peranan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam produksi (3) Minimnya identifikasi kebutuhan perempuan pedesaan dalam pembangunan pertanian, yang disebabkan karena (a) Staf kurang memiliki keahlian dalam analisis gender, sehingga menghambat proses perencanaan yang responsif gender (b) Pemahaman gender bagi staf di lapangan masih kurang, sehingga tujuan gender tidak tercapai seperti yang diharapkan, (4) Isu gender dianggap bukan masalah oleh para perencana dan pengambilan kebijakan, (5) Nilai-nilai sosial budaya yang kurang mendukung; mengakibatkan “bias gender” dari pembuat kebijakan, sehingga sering membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh berbagai sumber daya, baik fasilitas kredit, akses terhadap informasi maupun terhadap ilmu dan teknologi, (6) Statistik ketenagakerjaan menunjukkan upah yang berbeda untuk jenis

pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki dan kesempatan kerja perempuan di pedesaan masih lebih rendah dari laki-laki, (7) Teknologi tepat guna bagi perempuan di pedesaan kurang memadai sehingga pekerjaan yang dilakukannya kurang efisien, menyita waktu dan tenaga (*drudgery*).

Isu gender hanya dapat direalisasikan kalau program yang telah digariskan ditangani oleh orang-orang yang peduli dan mempunyai pemahaman yang benar tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perlu disadari bahwa ketidakseimbangan atas dasar perbedaan hak, merupakan hambatan bagi produktivitas masyarakat, yang akhirnya memperlambat laju pembangunan. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan, indikator gender merupakan aspek penting yang perlu dipantau agar pelaksanaan pembangunan tidak timpang tetapi justru menjadi lebih efisien.

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELEMBAGAAN ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN GENDER DALAM LITKAJI

Dari aspek sosialisasi, secara kuantitatif jumlah orang yang sudah terdedah dengan pendekatan SAGA secara keseluruhan adalah 553 orang terdiri dari 223 orang perempuan (40%) dan 330 orang laki-laki (60%) seperti disajikan pada Tabel 1. Jumlah yang seimbang antara alumni perempuan dan alumni laki-laki hanya terdapat pada Lokakarya TOM yakni masing-masing sembilan (9) orang. Dari jumlah tersebut, yang aktif menularkan ilmu tentang pendekatan SAGA tidak lebih dari lima orang saja. Oleh karena itu sangat diperlukan penyegaran dan pertemuan rutin untuk para alumni tersebut. Dengan cara demikian pengetahuan tentang SAGA dan keterampilan mengkomunikasikannya kembali kepada pihak lain akan dapat dipertahankan. Pada TOT, keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan mulai berkurang apalagi pada TOS. Hal ini sebagai akibat dari adanya persyaratan peserta yang relatif senior, memiliki otoritas, mau mengembangkan gender dan mampu mengkomunikasikan kembali materi yang diperoleh. Persyaratan semacam ini lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.

Tabel 1. Jumlah Alumni SAGA menurut jenis Pelatihan/*Training* sampai dengan TA. 2002

No	Jenis Lokakarya	Jumlah Alumni		Total
		P	L	
1.	TOM	9 (50%)	9 (50%)	18 (3%)
2.	TOT	55 (46%)	64 (54%)	119 (22%)
3.	TOS	159 (38%)	257 (62%)	416 (75%)
T o t a l		223 (40%)	330 (60%)	553 (100%)

Khusus untuk TOS telah terdapat 416 orang alumni terdiri dari 159 orang perempuan (37,9%) dan 257 orang laki-laki (62,1%). Jumlah ini diperoleh dari seluruh BPTP yang pernah menyelenggarakannya tanpa dibedakan provinsi yang dibiayai ARMP II atau PAATP (lihat Tabel 2). Tabel 2 juga menginformasikan bahwa peserta TOS ada juga yang berasal dari luar BPTP (20,6%). Provinsi Sumbar, Sumsel, Bali dan Kaltim sebenarnya belum melakukan TOS secara resmi, baru melakukan sosialisasi pendekatan SAGA dan tanpa melakukan praktek lapang. Bentuk penyampaian sosialisasi tersebut berupa ceramah saja. Khusus BPTP Sumsel dengan jumlah alumni TOS 60 orang karena sebenarnya sosialisasi dilakukan bersamaan dengan sebuah pertemuan kegiatan diseminasi.

Seperti telah diuraikan sebelumnya dalam rangka pelebagaan SAGA, dilakukan Monev pada delapan BPTP yang diamati. Nilai Monev yang diperoleh masing-masing BPTP yang dimonev disajikan pada Tabel 3. Nilai monev antar-BPTP ini tidak begitu jauh bedanya karena semuanya memiliki nilai sekitar 60 persen dari nilai yang seharusnya dicapai atau 425. Angka 425 ini merupakan 85 persen dari nilai total sebesar 500. Karena dampak lanjutan masih belum dapat dinilai dan bobotnya 15 dari skala 100 maka nilai yang dapat dicapai adalah 85 persen.

Tabel 2. Jumlah Peserta TOS dan Sosialisasi SAGA di BPTP s/d TA 2002

No	BPTP	BPTP		Luar BPTP		Total		Total
		P	L	P	L	P	L	
1.	Sumut	7	14	3	3	10	17	27
2.	Bengkulu	12	17	2	5	14	22	36
3.	Sumbar*)	14	20	-	-	14	20	34
4.	Sumsel*)	7	6	10	37	17	43	60
5.	Jateng**)	11	7	-	-	11	7	18
6.	Yogyakarta	4	9	-	-	4	9	13
7.	Bali*)	9	12	-	-	9	12	21
8.	Kalbar	9	9	-	-	9	9	18
9.	Kalsel	5	8	2	9	7	17	24
10.	Kaltim*)	7	12	-	-	7	12	19
11.	Sulsel	10	13	5	2	15	15	30
12.	Sultra	8	17	-	-	8	17	25
13.	Sulteng	18	24	-	-	18	24	42
14.	Sulut	7	7	-	-	7	7	14
15.	NTT	4	6	2	3	6	9	15
16.	NTB	3	17	-	-	3	17	20
Total		135 (32,4)	198 (47,6)	24 (5,8)	59 (14,7)	159 (37,9)	257 (62,1)	416 (100,0)

Sumber: Suhaeti dkk., 2002

Keterangan: *) Sosialisasi
**) Sosialisasi dan TOS

Nilai monev tertinggi diperoleh BPTP NTB sebesar 279,0 atau 65,7 persen dari nilai yang seharusnya diperoleh. Tempat kedua diduduki oleh BPTP DIY sebesar 275,5 atau 64,8 persen dari nilai yang seharusnya diperoleh. Tempat ketiga dipegang oleh BPTP NTT dengan nilai 274,5 atau 64,6 persen dari nilai yang seharusnya diperoleh. Demikian berturut-turut, tempat keempat kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan diperoleh BPTP Sulut, BPTP Sulteng, BPTP Sulsel, BPTP Riau dan BPTP Jambi.

Tabel 3. Nilai Monev Kegiatan SAGA di Delapan BPTP/Provinsi, 2001

No.	BPTP Provinsi	Nilai
1.	Nusa Tenggara Timur	274,5 (64,6)*)
2.	Nusa Tenggara Barat	279,0 (65,7)
3.	Sulawesi Selatan	256,0 (60,2)
4.	Sulawesi Tengah	270,5 (63,6)
5.	Sulawesi Utara	271,0 (63,8)
6.	DI Yogyakarta	275,5 (64,8)
7.	Jambi	210,0 (49,4)
8.	Riau	244,0 (57,4)

Sumber: Suhaeti, dkk., 2002

*) Catatan: Nilai dalam kurung adalah persentase nilai BPTP yang bersangkutan terhadap nilai yang seharusnya dicapai (425)

Inkorporasi SAGA ke dalam Proposal Litkaji

Telah dikatakan sebelumnya bahwa tujuan utama dari program SAGA ini adalah untuk memberikan atau meningkatkan kapasitas SAGA pada jajaran peneliti dan penyuluh di lingkup Badan Litbang. Pada gilirannya, para peneliti dan penyuluh tersebut dituntut untuk dapat menginkorporasikan pendekatan tersebut ke dalam Litkaji. Tabel 4 menyajikan nilai inkorporasi SAGA ke dalam Litkaji dari enam BPTP T.A. 2002. Nilai ini merupakan persentase jumlah proposal yang telah menginkorporasikan SAGA. Karena nilai tersebut diperoleh pada awal pengajuan proposal sampai penentuan kelulusan proposal maka tidak ada jaminan bahwa BPTP dengan nilai inkorporasi bagus telah melakukan inkorporasi dengan baik. Artinya bisa saja proposal dengan nilai inkorporasi SAGA bagus tidak jadi diberi dana sehingga tidak dilakukan Litkajinya. Ketika dikonfirmasi di lapangan, untuk BPTP NTT, BPTP NTB dan BPTP Yogyakarta, nilai tersebut sudah cocok, namun untuk BPTP lainnya masih perlu pemeriksaan lanjutan.

Tabel 4. Nilai Inkorporasi SAGA ke dalam proposal Litkaji BPTP T.A. 2002

No.	BPTP PROVINSI	Total Proposal yang Diajukan	Jumlah Proposal dengan Nilai Indikator SAGA >3	Persentase Jumlah Proposal dengan Nilai Indikator SAGA >3	Jumlah Judul Litkaji yang menerapkan pendekatan SAGA di lapangan
1.	Nusa Tenggara Timur	17	2	11,76	2 (100,00)*)
2.	Nusa Tenggara Barat	18	4	22,22	4 (100,00)
3.	Sulawesi Selatan	23	9	39,13	2 (22,22)
4.	Sulawesi Tengah	16	2	12,50	0 (0,00)
5.	Sulawesi Utara	24	20	83,33	2 (10,00)
6.	DI Yogyakarta	15	3	20,00	3 (100,00)
7.	Riau	33	6	18,19	2 (33,33)
8.	Jambi	22	2	9,10	0 (0,00)

Catatan: Nilai diperoleh dari Tim Asistensi, (Suhaeti dkk., 2001)

Angka dalam kurung merupakan persentase terhadap jumlah proposal yang nilai indikator SAGA-nya >3

Kendala dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelembagaan SAGA

Pelaksanaan sosialisasi dan pelembagaan SAGA di Lingkup Badan Litbang tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala. Pada awalnya, pelatihan berjenjang diharapkan membuahkan berbagai kelebihan seperti (1) pelembagaan SAGA dapat dilakukan dengan efektif dan (2) muncul kader-kader SAGA di setiap wilayah, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak selalu tergantung pada TIS. Namun harapan tersebut tidak tercapai karena adanya kendala utama yaitu langkanya ketertarikan sebagian besar staf BPTP terhadap gender, karena dianggap bahwa SAGA tidak menunjang secara langsung tujuan pendek mereka, yaitu publikasi ilmiah yang dapat dinilai kreditnya. Dengan alasan tersebut, maka pada umumnya meskipun mereka mengikuti pelatihan, kemampuannya untuk menyerap materi pelatihan serta kemauannya untuk mengajarkan kembali tidak optimal. Kenyataan semacam ini menyebabkan alumni pelatihan SAGA hampir tidak ada yang mandiri sesuai dengan tujuan pelatihan. Dengan tidak munculnya kader-kader SAGA yang andal, maka hal ini menjadi permasalahan tersendiri di dalam pelembagaan SAGA selama ini. Meskipun peserta pelatihan jumlahnya cukup banyak, dari aspek kualitas belum mendekati target yang diinginkan. Hal ini tercermin dari sering tidak bersedianya alumni TOT sebagai pengajar di dalam pelatihan TOS. Artinya, mereka merasa kurang percaya diri dan merasa belum cukup mampu untuk menjadi fasilitator. Salah satu penyebabnya adalah tidak terbiasanya staf di lingkup Badan Litbang pro aktif dalam pelatihan. Pada umumnya pelatihan yang selama ini dilakukan adalah satu arah, yaitu peserta sebagai pendengar dan mencatat materi yang diberikan oleh nara sumber. Suasana yang demikian itu ternyata tidak dapat diubah dengan

cepat, tetapi memerlukan proses panjang. Program SAGA mulai memperkenalkan hal ini dan Tim Asistensi Badan Litbang kemudian mengadopsi pendekatan tersebut di dalam program pelatihannya.

Kendala yang tidak kurang pengaruhnya terhadap keberhasilan sosialisasi dan pelembagaan SAGA adalah sikap apriori dari para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun BPTP. Selain itu, sifat pasif dari staf untuk mengetahui lebih jauh mengenai SAGA itu sendiri ternyata relatif rendah. Akibatnya, meskipun di setiap BPTP telah ditunjuk *focal points*, kemandirian mereka untuk mengembangkan program di unit kerjanya masih terbatas.

Konsekuensi dari kualitas *focal points* yang sebagian besar masih menunggu “petunjuk dari pusat” inilah yang menjadi penyebab tidak terdengarnya gaung program dengan nyaring. Misalnya, inkorporasi SAGA ke dalam litkaji belum signifikan, demikian pula sebagian besar alumni TOT belum mulai melaksanakan pembentukan jaringan kerja dengan mitra kerja, baik di Pemda, Universitas maupun di kalangan LSM di wilayahnya. Khusus mengenai inkorporasi SAGA ke dalam litkaji, sebelumnya telah digariskan suatu ketentuan oleh Tim Asistensi Badan Litbang Pertanian, bahwa SAGA merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan di dalam penilaian proposal BPTP. Tetapi dengan adanya perubahan organisasi Tim Asistensi beberapa waktu yang lalu, tampaknya ketentuan tersebut tidak diperhatikan lagi.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

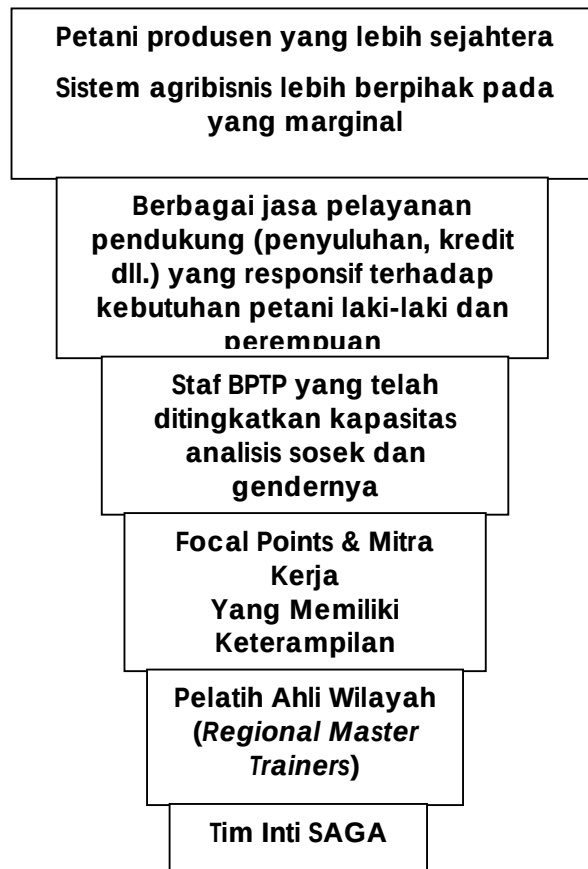
1. Dalam rangka sosialisasi pendekatan SAGA, konsep pelatihan berjenjang yang telah dilaksanakan belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Semula diharapkan bahwa aplikasi pelatihan berjenjang mampu memberi solusi terhadap kendala jumlah SDM di Tim Inti SAGA (TIS). Artinya setiap alumni mampu berperan sebagai *focal points* SAGA, disamping mampu membentuk jejaring kerja dengan mitra kerja di wilayahnya. Penyebab utama hal ini sebetulnya sudah diidentifikasi pada saat pelatihan TOM, yaitu tidak semua peserta TOM mempunyai kemampuan berkomunikasi secara memadai. Akibatnya tidak semuanya mampu melakukan sosialisasi SAGA di unit kerja masing-masing.
2. Tidak optimalnya output TOM mengakibatkan pembentukan jaringan mitra kerja di masing-masing wilayah tersendat. Hal-hal tersebut mencerminkan tingkat ketergantungan alumni TOM kepada TIS masih cukup besar, suatu hal yang sebetulnya sama sekali tidak diharapkan pada awal kegiatan SAGA. Kurang optimalnya alumni TOM juga berakibat langsung pada output penyelenggaraan TOT dan TOS. Kurangnya penguasaan materi

SAGA oleh fasilitator menyebabkan tidak optimalnya pemahaman para peserta di berbagai lokakarya SAGA.

3. Dari segi kuantitas, hasil sosialisasi cukup menggembirakan walaupun dari segi kualitas masih perlu peningkatan. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah alumni TOM dan TOT yang belum mampu menularkan ilmu yang diperoleh saat pelatihan.
4. Berbagai hasil monev yang dilaporkan di sini secara langsung menunjukkan bahwa pelebagaan pendekatan SAGA belum optimal yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai Monev yang diperoleh setiap BPTP yang diamati.
5. Tampaknya TIS perlu belajar dari pengalaman selama ini, bahwa berbagai kegiatan penyelenggaraan pelatihan SAGA di masa depan harus dipersiapkan dengan lebih matang, sehingga masing-masing fasilitator lebih siap. Hal ini akan berakibat positif terhadap pemahaman peserta lokakarya akan materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kingsley, M. A., dan S.S. Siwi, 1998. Menuju Pelebagaan PHT oleh Petani Wanita dan Laki-laki: Panduan kegiatan analisis jender. Tim Bantuan Teknis FAO, Indonesia & DEPTAN, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu. Jakarta.
- Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (KPDTNT). 1996. Dimensi Gender dalam Pengembangan Program secara Partisipatif: Buku Saku untuk Petugas Program, Selipan I. Driyamitra. Kupang.
- Muffels, J.T. and S.S. Siwi. 1990. Women in Agriculture, Inventory WID and WID Integrated Projects Sponsored by IGGI Donors, Consultants, The Embassy of The Netherlands. Jakarta.
- Siwi, S.S., dan I. Manwan, 1991. *Women in Rice Farming Activities in Indonesia*. 22nd Asian Rice Farming Systems Working Group Meeting, Beijing, China: 198-218.
- Siwi, S.S., F. Sulaiman, E. Basuno, R.N. Suhaeti, Rochlini and C. P. Pelzer. 2000. Socio-economic & Gender Analysis (SAGA) in Agriucultural Research and Development Programme. SAGA Core Team, AARD. Jakarta.
- Suhaeti, R.N., dan E. Basuno, 2001. Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) di Sektor Pertanian, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Program Berwawasan Gender, Bappenas – Women Support Project II, di Hotel Lake Side, Bogor, 13 – 15 Februari 2001.
- Suhaeti, R.N., E. Basuno, F. Sulaiman, H. Supriadi, S.S. Siwi dan S. Iskandar. 2001. Laporan Hasil Kegiatan Tindak Lanjut Pembentukan Jejaring SAGA (SAGA NETWORKING) di Lingkup Badan Litbang Pertanian. PSE kerja sama dengan P2KP3. Bogor.
- Suhaeti, R.N., E. Basuno, F. Sulaiman, H. Supriadi dan S.S. Siwi. 2002. Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Dampak Awal Sosialisasi dan Pelebagaan SAGA di Lingkup Badan Litbang Pertanian. PSE kerja sama dengan P2KP3. Bogor.



Gambar 1. Sistem *cascade* berupa piramida terbalik dalam sosialisasi dan pelebagaan gender lingkup Litbang Pertanian

Lampiran 1. Contoh Lembar Kerja MONEV Kegiatan SAGA

LEMBAR KERJA MONITORING DAN EVALUASI SOSIALISASI DAN PELEMBAGAAN SAGA UNTUK BPTP YANG BELUM MENYELENGGARAKAN TOS - SAGA LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN

BPTP: Riau

No.	Kegiatan/Indikator	Bobot	Skor	Nilai
I.	INPUT & PROSES: AKTIFITAS FOCAL POINTS SAGA	20		
	- Sosialisasi terbatas pada kolega		2	
	- Melakukan / membuat jaringan kerja dengan mitra kerja dalam pengembangan SAGA		2	
	- Memberikan konsultasi SAGA kepada staf pengkaji (peneliti dan penyuluh) dalam menginkorporasikan SAGA ke dalam kegiatan pengkajian dan penelitian (Litkaji) dan diseminasi hasil-hasilnya.		3	
	Rata-rata		2,3	46
II.	Luaran Awal: Pemahaman SAGA *)	20		
	- Penentu Kebijakan: (Kepala BPTP dan jajarannya)		4	
	- Peneliti		3	
	- Penyuluh		3	
	- Lainnya		2,5	
	Rata-rata		3,1	63
III.	Luaran Lanjutan: Pelaksanaan Litkaji dan diseminasi hasil Litkaji berspektif SAGA (Inkorporasi kerangka kerja SAGA dalam proposal dan pelaksanaan kegiatan Litkaji/diseminasi **)	25		
	- Penggunaan metode penelitian partisipatif (PRA)		3	
	- Penerapan analisis gender		3	
	- Penerapan analisis sosial ekonomi		3	
	- Keberpihakan pada kelompok kurang beruntung***)		3	
	Rata-rata		3	75
IV.	Dampak Awal:	20		
	- Tercapainya inkorporasi SAGA dalam Litkaji		3	
	- Terbentuknya jejaring SAGA		3	
	Rata-rata		3	60
	Nilai Sementara			244 (57,4)****)
V.	Dampak Lanjutan: (belum dinilai)	15		
	- Meningkatnya adopsi teknologi hasil Litkaji			
	- Peningkatan manfaat Litkaji untuk pengguna			
	- Jenis Litkaji atau teknologi yang dihasilkan mengakomodasi kebutuhan mayoritas pengguna termasuk kelompok yang kurang beruntung***)			
	Rata-rata			
	Total nilai	100		

Skor: 1 – 5 (terbaik 5)

*) diambil dari hasil wawancara

**) mulai dengan proposal T.A. 2002

***) kelompok miskin, kelompok yang tidak terlibat dalam pembangunan atau terkena dampak negatif pembangunan paling parah termasuk kelompok perempuan

****) Persentase terhadap nilai total yang seharusnya dicapai (425)

LEMBAR KERJA
MONITORING DAN EVALUASI SOSIALISASI DAN PELEMBAGAAN SAGA
UNTUK BPTP YANG SUDAH MELAKSANAKAN TOS - SAGA
LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN

BPTP: DIY

No.	Kegiatan/Indikator	Bobot	Skor	Nilai
I.	INPUT: AKTIFITAS FOCAL POINTS SAGA	10		
	- Persiapan TOS		3,0	
	- Melakukan / membuat jaringan kerja dengan mitra kerja dalam pengembangan SAGA		3,0	
	- Memberikan konsultasi SAGA kepada staf pengkaji (peneliti dan penyuluh) dalam menginkorporasikan SAGA ke dalam proposal kegiatan pengkajian dan penelitian (Litkaji) dan diseminasi hasil-hasilnya.		3,0	
	Rata-rata		3,0	30,0
II.	Proses: Training of Staff (TOS)	10		
	- Persiapan (modul, peserta, <i>rehearsal</i> , fasilitator, dana dsb.)		4,0	
	- Organisasi: kepanitiaan		4,0	
	- Koordinasi dengan para fasilitator dan peserta luar BPTP		4,0	
	- Partisipasi peserta: jumlah, tingkat kehadiran dan aktifitas peserta		4,0	
	- Hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>		4,0	
	Rata-rata		3,8	38,0
III.	Luaran Awal: Pemahaman SAGA *)	20		
	- Penentu Kebijakan: (Kepala BPTP dan jajarannya)		3,0	
	- Peneliti		3,0	
	- Penyuluh		3,0	
	- Lainnya		3,0	
	Rata-rata		3,0	60,0
IV.	Luaran Lanjutan: Pelaksanaan Litkaji dan diseminasi hasil Litkaji berspektif SAGA (Inkorporasi kerangka kerja SAGA dalam proposal dan pelaksanaan kegiatan Litkaji/diseminasi **)	25		
	- Penggunaan metode penelitian partisipatif (PRA)		3,5	
	- Penerapan analisis gender		3,0	
	- Penerapan analisis sosial ekonomi		3,5	
	- Keberpihakan pada kelompok kurang beruntung***)		4,0	
	Rata-rata		3,5	87,5
V.	Dampak Awal:	20		
	- Tercapainya inkorporasi SAGA dalam Litkaji		3,0	
	- Terbentuknya jejaring SAGA		3,0	
	Rata-rata		3,0	60,0
	Nilai sementara			275,5 (64,8)****)
VI.	Dampak Lanjutan: (belum dinilai)	15		
	- Meningkatnya adopsi teknologi hasil Litkaji			
	- Peningkatan manfaat Litkaji untuk pengguna			
	- Jenis Litkaji atau teknologi yang dihasilkan mengakomodasi kebutuhan mayoritas pengguna termasuk kelompok yang kurang beruntung***)			
	Rata-rata			
	Total nilai	100		

Skor: 1 – 5 (terbaik 5)

*) diambil dari hasil wawancara

**) mulai dengan proposal T.A. 2002

***) kelompok miskin, kelompok yang tidak terlibat dalam pembangunan atau terkena dampak negatif pembangunan paling parah termasuk kelompok perempuan

****) Persentase terhadap nilai total yang seharusnya dicapai (425)